

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap masyarakat memiliki budaya masing-masing di tiap daerah yang berbeda. Tidak hanya budaya dalam kebiasaan sehari-hari, namun budaya tersebut termasuk dalam budaya politik. Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, partisipasi masyarakat dalam pemilu, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.

Menurut *Dennis Kavanagh* dalam buku Beddy Irawan, ada dua alasan budaya politik penting untuk dipelajari yaitu, pertama sikap warga negara terhadap sistem politik jelas mempengaruhi macam-macam tuntutan yang diminta, cara tuntutan-tuntutan itu diutarakan, respon dan golongan elit cadangan dukungan yang baik terhadap rezim yang berkuasa, pokoknya orientasi-orientasinya yang menentukan pelaksanaan sistem politik. Misalnya, tuntutan yang diminta pada sistem respon terhadap undang-undang dan permintaan dukungan serta tingkah laku individu dalam peranan politik mereka. Jadi pendekatan budaya politik untuk mempertinggi kemampuan kita menggambarkan dan menganalisis interaksi antara sistem politik dan

budayanya. Dengan membedakan antara tingkah laku dan sikap kita dapat menjelaskan perbedaan pelaksanaan struktur dan sistem politik dalam budaya.

Kedua, dengan mengerti akan sifat dan hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sistemnya, setiap orang akan lebih dapat menghargai cara-cara yang mungkin akan membawa perubahan-perubahan politik yang pesat. Hal ini terutama relevan dengan kebanyakan ahli politik yang berkecimpung dalam melokalisasi persyaratan-persyaratan pemerintahan yang stabil demokratis.¹

Budaya politik bukan saja merefleksikan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, tapi budaya politik dapat mencerminkan suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan publik untuk masyarakat.² Menurut *Almond* dan *Verba* budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem politik tersebut. Inilah yang menjadi tolak ukur atau kunci kebaruan penelitian ini. Secara sederhana budaya politik mengacu pada keseluruhan pengetahuan, sikap emosional³ dan penilaian etika moral⁴ yang berkaitan dengan isu-isu politik⁵ yang mempengaruhi kehidupan

¹ Beddy Iriawan Maksudi. *Sistem Politik Indonesia, Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. hlm 45-46.

² Hening Suryo, Budaya Politik Negara Maju dan Negara Berkembang : Suatu Perbandingan. *Jurnal Transformasi I* (27): 1-47. 2015.

³ Sikap emosional yang dimaksud adalah tentang cara pemerintah seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan pemerintah.

⁴ Etika moral yang dimaksud adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya dalam bermasyarakat.

⁵ isu politik adalah berita atau masalah politik yang hangat diperbincangkan, tetapi belum jelas kebenarannya.

masyarakat. Sikap dan tingkah laku inilah menjadi suatu objek penanda gejala-gejala politik⁶ yang akan terjadi dalam sistem politik.

Menurut *Almond* dan *Verba*, ketika mengkaitkan budaya politik dengan orientasi dan sikap politik seseorang terhadap sistem politik, serta sikap peranan kita sendiri dalam sistem politik artinya, jika ingin melihat kebudayaan politik suatu masyarakat, haruslah merujuk pada sistem politik seperti yang diinternalisasikan kedalam kognitif, afektif, dan evaluatif.

Almond dan *Verba* mengatakan bahwa orientasi politik menjadi syarat utama dalam kebudayaan politik itu sendiri, selanjutnya *Almond* dan *Verba* mengklasifikasikan budaya politik menjadi tiga tipe-tipe kebudayaan politik, yaitu kebudayaan politik parokial, kebudayaan politik subyek, dan kebudayaan politik partisipan.

Dalam setiap masyarakat terdapat budaya politik yang menggambarkan pandangan mengenai proses politik yang berlangsung di lingkungan masyarakat itu sendiri. Budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula kedalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah, karena sistem politik itu sendiri adalah interelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan, dan wewenang.

Kultur sosial yang ada dimasyarakat yaitu masalah etnis menjadi salah satu tema yang menarik untuk dikaji dalam budaya politik. Dimana etnis adalah

⁶ Gejala politik yang dimaksud adalah membicarakan atau lebih menitikberatkan pada hubungan antara politik, struktur sosial, ideologi, dan budaya.

kelompok sosial yang disebut etnis, karena mereka mempunyai satu atau lebih simbol-simbol kebudayaan seperti halnya sebagai akibat dari agama, atau kepercayaan, keturunan, bahasa, kesamaan asal-usul (negeri), gaya hidup dan adat istiadat⁷. Jika kita kaitkan dengan budaya politik, etnis sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan politik sekarang ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Syafarudin dan Darmawan purba dengan judul Analisis Orientasi, Sikap, Pilihan dan Budaya Politik Pemuda-Pemudi Etnis Lampung Era Kontemporer⁸.

Kota Padang merupakan daerah yang menjadi Ibu Kota Provinsi dengan berbagai macam etnis. Beberapa etnis diantaranya adalah Nias, Batak, Mentawai, Tionghoa, dan Minangkabau. Namun etnis yang menjadi mayoritas di kota Padang adalah Etnis Minangkabau dan penganut agama Islam. Kebudayaan Politik Minangkabau yang berkembang di *Luhak nan Tuo* (daerah asal budaya Minangkabau di wilayah Kabupaten Tanah Datar sekarang) telah menyebarkan pengaruhnya sampai ke wilayah luar batas geografis. Minangkabau adalah kehendak penguasa kala itu. Kekuasaan yang bersumber dari sistem kerajaan Pagaruyung tidak signifikan muncul dalam perilaku politik masyarakat secara umum. Kekuasaan yang banyak bersumber dari hukum islam dan aturan adat

⁷ Prayudi., Akar Masalah Penyebab Konflik Etnis Dan Alternatif Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kalbar dan Kalteng). *Jurnal Ketahanan Nasional IX* (3) 12: 39-59. 2004

⁸ Hasil penelitian dari Syafrudin dan Dermawan dengan judul analisis orientasi, sikap dan budaya politik etnis lampung era kontemporer dengan hasil penelitian, adanya perubahan kultur politik pada pemuda-pemudi etnis lampung kekinian yang disebabkan oleh tingkat pendidikan dan ekonomi kelas menengah etnis lampung yang cukup meningkat, serta peran dari partai politik yang gencar melakukan rekrutmen politik, kampanye politik, dan penyerapan aspirasi kaum muda. Orientasi politik pemuda-pemudi etnis lampung tidak hanya berwawasan lokal seputar provinsi Lampung, tapi mampu juga berwawasan regional dan internasional. Rujuk pembahasan lebih lanjut. penelitian Syafrudin, Darmawan Purba, Analisis Orientasi, Sikap, Pilihan, dan Budaya Politik Pemuda-Pemudi Etnis Lampung Era Kontemporer, *Jurnal analisis sosial politik*. 1 (1): 1 53-73. 2017

sebagai identitas kebudayaan Minangkabau lebih banyak tergambar dalam kompleksitas Budaya Minangkabau dan kajian-kajian ilmiah.⁹

Tokoh dan *Takah* adalah paduan kata yang populer dikalangan orang Minang dalam memilih pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki sifat ketokohan (*tokoh*), seperti halnya dengan pemahaman dalam bahasa Indonesia, sebagai sifat yang didukung oleh kemampuan SDM memadai, populer, memiliki elektabilitas, integritas. *Takah* arti harfiah enak dilihat atau dipandang. Secara konotatif, sifat *takah* ini pemahamannya mengacu kepada seseorang yang dianggap memiliki pancaran kharisma, pantas, layak atau patut bila diangkat sebagai pemimpin. Secara sederhana *takah* dicermati dari tampilan fisik, gerak gerik perilaku dan caranya berbicara. Sifat ini diambil sebagai salah satu kriteria dalam memilih seseorang menjadi *penghulu kaum* dalam tradisi kepemimpinan adat di Minangkabau.¹⁰

Dalam dewasa ini pemilihan pemimpin dilaksanakan melalui pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD dan DPD. Pemberian suara dalam kegiatan pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang sering kali dilakukan oleh masyarakat di daerah dibandingkan partisipasi politik lain. Kegiatan partisipasi politik, meskipun kelihatannya hanya menyangkut soal pemberian suara, sebenarnya juga menyangkut semboyan-semboyan yang diberikan dalam kampanye.

⁹ Nursirwan Effendi, Budaya Politik Khas Minangkabau Sebagai Alternatif Budaya Politik Indonesia, *Journal Masyarakat Indonesia*, Vol 40 (1), hlm 81. 2014

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 79.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.¹¹

Tabel 1.1
Hasil Rekapitulasi Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden Padang Tahun 2019

Kabupaten/Kota	SS	STS	Jumlah	DPT	Partisipasi
Kab. Dharmasraya	126.341	1.760	128.101	143.907	89,0 %
Kab. Pasamaan Barat	218.061	2.887	220.948	250.723	88,1 %
Kota Solok	40.565	422	40.987	47.418	86,4 %
Kota Sawahlunto	38.418	600	39.018	45.778	85,2 %
Kota Payakumbuh	73.972	1.009	74.981	88.849	84,4 %
Kota Pariaman	51.242	596	51.838	61.523	84,3%
Kab. Solok Selatan	93.131	1.710	94.841	114.161	83,1%
Kota Padang Panjang	31.638	341	31.979	38.781	82,5%
Kab. Pesisir Selatan	266.942	3.442	270.384	331.260	81,6%
Kab. Pasaman	160.359	2.558	162.917	199.836	81,5%
Kab. Sijunjung	125.717	1.713	127.430	156.595	81,4%
Kab. Limapuluh Kota	210.927	3.893	214.820	265.161	81,0%
Kab. Kep. Mentawai	50.327	465	50.792	63.103	80,5%
Kota Padang	70.189	3.693	473.882	592.162	80,0%
Kota Bukittinggi	62.907	609	63.516	81.447	78,0%
Kab. Solok	206.063	3.872	209.935	281.902	74,5%
Kab. Tanah Datar	198.128	3.072	201.200	276.615	72,7%
Kab. Agam	257.081	3.853	260.934	365.029	71,5%
Kab. Padang Pariaman	214.486	3.730	218.216	313.987	69,5%

¹¹ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.367. 2008

Total	2.896.494	40.225	2.936.719	3.718.247	79,0%
-------	-----------	--------	-----------	-----------	-------

Sumber : Data Sekunder KPU Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Tabel di atas terlihat tingkat partisipasi masyarakat Sumatera Barat sebesar 79,0%. Kota Padang menduduki peringkat ke 14 dari 19 Kabupaten atau Kota di Sumatera Barat. Selain itu Kota Padang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat yang menjadi subjek penelitian ini di karenakan Kota Padang adalah Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat dan memiliki jumlah DPT yang besar yaitu 592.162 jiwa dengan tingkat partisipasi yang tergolong besar yaitu sekitar 80,0%.

Pada pemilihan umum tahun 2014 dan 2019 lalu diadakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahun 2014 yang menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan Calon Prabowo – Hatta dan pasangan calon Jokowi – JK. Pada tahun 2019 lalu yang menjadi pasangan calonnya adalah Jokowi – Ma’ruf dan pasangan calon Prabowo – Sandi.

Pada pemilu tahun 2014, telah ditetapkan bahwa pasangan Prabowo – Hatta telah memenangkan suaranya di Kota Padang. Meskipun pada akhirnya yang menjadi Presiden adalah pasangan calon Jokowi – JK untuk periode 2014-2019. Pada tahun 2019 terjadi kembali hal serupa yang terjadi di tahun 2014, yaitu pasangan Prabowo – Sandi berhasil memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan umum di Kota Padang. Menariknya adalah Masyarakat Kota Padang yang mayoritas merupakan orang Minangkabau yang masih percaya dan yakin untuk mendukung Pasangan Prabowo – Sandi meskipun pada tahun 2014 pasangan tersebut gagal menjadi kepala negara.

Tabel 1.2
Hasil Rekapitulasi Pleno KPU Kota Padang Perolehan Tingkat Partisipasi
Calon Presiden dan Wakil Presiden Padang Tahun 2014

No.	Kecamatan	DPT	Pengguna hak pilih	Tidak Memilih
1.	Padang Selatan	44,219	28,184	16,035
2.	Padang Timur	60,317	37,267	23,050
3.	Padang Barat	35,834	22,517	13,317
4.	Padang Utara	41,328	26,279	15,049
5.	Bungus Teluk Kabung	18,298	10,355	7,943
6.	Lubuk Begalung	77,543	51,616	25,927
7.	Lubuk Kilangan	36,408	23,267	13,141
8.	Pauh	39,646	26,282	13,364
9.	Kuranji	108,992	59,960	49,032
10.	Nanggalo	45,361	26,972	18,389
11.	Koto Tangah	128,968	77,820	51,148
Total		636,914	390,519	246,395
Presentase (%)			61.31%	38.68%

Sumber : Di olah dari Data Sekunder KPU Kota Padang

Berdasarkan hasil dari tabel di atas terlihat bahwa masyarakat Kota Padang ikut berpartisipasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dari jumlah DPT masyarakat Kota Padang yaitu 639.914 jiwa hanya 61,31% saja yang menggunakan hak pilihnya. Terlihat dari tabel di atas masyarakat Kota Padang bisa dikatakan memiliki tingkat Partisipasi yang cukup aktif.

Tabel 1.3
Hasil Rekapitulasi Pleno KPU Kota Padang Perolehan Tingkat Partisipasi
Calon Presiden dan Wakil Presiden Padang Tahun 2019

No.	Kecamatan	DPT	Total Pemilih	Tidak Memilih
1.	Padang Selatan	41,266	33,112	8,144
2.	Padang Timur	55,502	42,210	13,292
3.	Padang Barat	31,714	23,526	8,188
4.	Padang Utara	46,947	31,421	15,526
5.	Bungus Teluk Kabung	18,151	14,166	3,985
6.	Lubuk Begalung	79,323	62,410	16,913
7.	Lubuk Kilangan	37,563	28,192	9,371
8.	Pauh	44,259	33,704	10,555
9.	Kuranji	99,566	75,841	23,725
10.	Nanggalo	39,807	31,159	8,648
11.	Koto Tangah	132,437	98,141	34,296
Total		626,535	473,882	152,653
Presentase (%)			75.63%	24.36%

Sumber : Di olah dari Data Sekunder KPU Kota Padang

Berdasarkan hasil dari tabel di atas terlihat bahwa partisipasi Masyarakat Kota Padang tergolong tinggi. Dari 626.535 DPT di Kota Padang yang menggunakan hak pilihnya yaitu sebanyak 473.882 pengguna hak pilih (75.63%).

Beberapa masyarakat kota Padang berpendapat bahwa ada beberapa alasan masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Misalkan saja *Yas Efendi* salah seorang pemilik kedai atau lapau di Jl Khairil Anwar, kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat yang peneliti temui sebelum hari pencoblosan, Pria 38 tahun itu mengklaim bahwa 85% orang Minang di Padang mendukung Prabowo. “Awak (saya) yakin Prabowo menang di sini, Kalau di Padang ini kan masalah agama kuek (kuat) dek itu urang Padang ko Mamilih Prabowo. Prabowo

ko dari militer lo kan samantaro Jokowi tu entah dari ma tamat nyo. Dia (Prabowo) lebih mengetahui tentang masalah agama.” Ungkap Beliau¹².

Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, berpendapat bahwa budaya menjadi faktor yang dominan dalam mempengaruhi pilihan masyarakat Sumbar. Menurut dia, Prabowo dipandang lebih memiliki karisma politik dibandingkan Jokowi. "Kalau Prabowo kita gambarkan lebih berapi-api ya. Dia mau bekerja untuk kepentingan masyarakat, nasionalisme, dan seterusnya. Gambaran seperti yang disebut tageh," tutur Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi. "Penampilan Prabowo, jika dibandingkan Jokowi, baik secara fisik maupun kemampuan berbicara, retorikanya, itu dimiliki oleh Prabowo. Jadi *political impression* itu sebagai pertimbangan bahwa secara politik bahwa Prabowo punya kelebihan," kata Asrinaldi¹³.

Dalam konteks ini, peneliti mengkaitkan antara Budaya politik dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Almond ada pola-pola kebudayaan politik yang bisa dilihat dari pemilihan. Artinya, menurut asumsi peneliti dengan Pemilu kita bisa melihat sikap politik yang diambil oleh seseorang atau sekelompok orang yang nantinya akan berujung pada kebudayaan politik seseorang atau sekelompok orang tersebut.

Peneliti beranggapan bahwa Partisipasi Politik di Kota Padang dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipengaruhi oleh Budaya Politik

¹² Yas efendi, Pemilik Kedai, Jl. Khairil Anwar, Mei 2019 Pk 17.00 WIB, Wawancara singkat antara peneliti dan narasumber

¹³ <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/04/19/orang-padang-buktikan-kemenangan-untuk-prabowo>

Masyarakat Minangkabau di Kota Padang. Kondisi inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Budaya Politik Masyarakat Minangkabau Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Padang”

1.2 Rumusan Masalah

Budaya politik masyarakat Minangkabau di Kota Padang dalam menentukan seorang pemimpin dikenal dengan istilah 3T yang menjadikan masyarakat tersebut cenderung memutuskan hak pilihnya kepada Jokowi dan Prabowo dalam pemilihan umum 2014 dan 2019. Dalam hal tersebut 3T itu dikenal dengan Takah, Tageh, Tokoh yang menjadi kriteria sendiri bagi masyarakat Minangkabau agar seseorang layak atau pantas untuk menjadi seorang pemimpinnya.

Pemilihan umum calon Presiden dan Wakil presiden dimana calonnya adalah Prabowo dan Jokowi telah dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2014 Prabowo-Hatta dengan Jokowi-JK dan 2019 Jokowi-Ma'ruf dengan Prabowo-Sandi. Berikut data tingkat partisipasi masyarakat Kota Padang tahun 2014 dan 2019 beserta perolehan suaranya:

Tabel 1.2.1
Perbandingan tingkat partisipasi masyarakat Kota Padang tahun 2014 dan 2019 dan perolehan suaranya

No	Tahun	Persentase Tingkat Partisipasi Politik
1	2014	61.31%
2	2019	75.63%

Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan data dari KPU Kota Padang

Berdasarkan Tabel 1.2.1 terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kota Padang pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 14.32% dari tahun 2014. Dengan calon yang sama yaitu Prabowo dan Jokowi, tingkat partisipasi pada 2014 dan 2019 mengalami kenaikan. Pada pemilihan 2014 dan 2019 tersebut prbaowo lebih unggul di Kota Padang. sehingga peneliti berasumsi bahwa adanya pengaruh budaya politik masyarakat Minangkabau terhadap partisipasi politik.

Agar penelitian ini menjadi terarah dan ruang lingkup tidak terlalu luas maka berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, permasalahan yang diteliti secara rinci adalah: **Bagaimana Pengaruh Budaya Politik Masyarakat Minangkabau terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Padang?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah: untuk menjelaskan dan mengukur Pengaruh Budaya Politik Masyarakat Minangkabau terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Diharapkan dapat membantu merangsang pihak-pihak tertentu baik Pemerintah Kota Padang atau organisasi politik untuk mempertahankan tingkat partisipasi masyarkat Kota Padang dalam pemilihan umum selanjutnya berikutnya.



2. Secara Akademis

penelitian ini dapat menjelaskan budaya politik Minangkabau dalam partisipasi politik masyarakat kota Padang dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, dan penelitian ini juga bisa menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti mengenai perilaku pemilih.

3. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu peneliti lain dalam penggunaan teori budaya politik serta dapat memberikan kontribusi untuk menjelaskan fenomena terkait dengan perbedaan pengetahuan politik dan budaya politik masyarakat.

